

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Penyerapan Anggaran: Perencanaan, Barang dan Jasa, dan Partisipasi

Suherman¹, Cris Kuntadi²

¹Suherman, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: suhermanbmkg@gmail.com

²Cris Kuntadi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding Author: Suherman*

Abstrak : Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian atau artikel ilmiah. Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu Perencanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Partisipasi anggaran. Abstrak berisi bagian-bagian sebagai berikut.

Tujuan - Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membangun hipotesis pengaruh antara Penyerapan anggaran, yaitu Perencanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Partisipasi anggaran yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Desain/metodologi/pendekatan - Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dan penelitian kepustakaan yang mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal-jurnal baik secara offline di perpustakaan maupun secara online.

Temuan - Hasil dari artikel tinjauan pustaka ini adalah: 1) Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran; 2) Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran; 3) Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Keterbatasan/implikasi penelitian - Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran selain perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, partisipasi anggaran.

Implikasi praktis - Membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dan menemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

Keaslian/nilai - Memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antara Penyerapan anggaran, Perencanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Partisipasi anggaran.

Keyword: Penyerapan anggaran, Perencanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Partisipasi anggaran.

Pendahuluan

Latar Belakang

Anggaran belanja negara merupakan suatu perencanaan moneter yang disusun teratur dan sistematis yang dijadikan sebagai panduan pelaksanaan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menetapkan batas tertinggi pengeluaran dalam implementasi kegiatan pemerintahan dimana pengeluaran belanja pemerintah yang berkualitas juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan APBN dimasukkan dalam dokumen yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu yang telah disusun oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tiap satuan kerja melaksanakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang termasuk dalam penyerapan anggaran berdasarkan DIPA setelah

pengesahan DIPA. Berdasarkan pernyataan disampaikan bahwa suatu estimasi atau target yang ditetapkan sebagai tujuan yang ingin dicapai untuk suatu periode tertentu disebut dengan penyerapan anggaran. Pada kenyataannya penyerapan anggaran ini pada prakteknya seringkali ditemukan pola yang tidak terstruktur seperti cenderung terjadi penumpukan di triwulan terakhir periode anggaran. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah penilaian yang memiliki indikator untuk mengukur tingkat capaian kinerja realisasi dan tingkat penyerapan anggaran oleh masing-masing Kementerian Negara dan Lembaga. Pengukuran tersebut meliputi penilaian dari segi ketepatan dan kesesuaian perencanaan terhadap pelaksanaan, pelaksanaan anggaran yang tepat guna, efisien dan efektif, kemampuan dalam penyerapan anggaran tepat guna dan sesuai kebutuhan serta mengukur tingkat kepatuhan terhadap aturan dan regulasi dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga Peraturan Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Perekonomian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2023 dalam upaya untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara.

Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal lainnya.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bahwa faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran, barang dan jasa, dan partisipasi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi menurunnya penyerapan anggaran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
2. Apakah Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?
3. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran?

Kajian Teori

Penyerapan anggaran

Anggaran ialah hal yang krusial dalam organisasi karena jika tidak ada anggaran maka organisasi tersebut tidak dapat melakukan kegiatan operasional. Menurut Sodikin (2015) pemahaman terhadap anggaran diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari keseluruhan proses penyusunan anggaran sedangkan pengertian penganggaran dapat dipahami sebagai suatu prosesnya dalam penyusunan anggaran tersebut. Menurut Mahsun (2019) penyusunan anggaran (budgeting) atau sering disebut penganggaran merupakan suatu tahapan penyusunan perencanaan keuangan suatu organisasi yang dilakukan melalui penyusunan rencana kerja dan kinerja dalam periode dengan periode satu tahun. Penganggaran adalah hal

penting dibutuhkan dalam suatu pemerintahan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan dan kinerja organisasi.

Sesuai dengan pemikiran Halim (2014) disampaikan bahwa penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai suatu capaian atas kinerja dari estimasi atau target yang ingin dicapai untuk masa waktu tertentu atau dapat dikatakan sebagai pencapaian atas realisasi anggaran. Penyerapan anggaran menjadi indikator penting untuk mengetahui kinerja anggaran suatu Kementerian dan Lembaga. Penyerapan anggaran merupakan pencapaian realisasi dari perkiraan yang di capai selama periode tahun berjalan.

Perencanaan anggaran, stimulasi dan persetujuan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengendalian anggaran, dan penyerapan anggaran merupakan langkah awal dalam siklus penyerapan. Kinerja pemerintah akan ditentukan oleh seberapa banyak tujuan yang telah dicapai, menurut Mardiasmo (2009:72) Misalnya, belanja barang dan jasa yang secara signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah perlu memiliki rencana pengelolaan yang solid.

Perencanaan Anggaran

Pemerintah diminta efisien dan efektif dalam pengalokasian anggaran tersebut. Ini berarti ada yang harus ditekankan pada pengendalian strategis pengeluaran agregat dan penetapan prioritas; dan fasilitasi efisiensi dan efektivitas Cris Kuntadi et al, (2022).

Perencanaan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Proses perencanaan merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, siklus keuangan daerah ini merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Rahajeng (2016).

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin dengan indikator sebanyak tujuh pertanyaan yang telah dikembangkan dalam penelitian Herriyanto (2012) dan Sulaeman (2012).

Perencanaan Anggaran merupakan proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabungkan dan mengkoordinasi berbagai aktivitas. Ramadhani & Setiawan (2019).

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam penyerapan anggaran yang maksimal sehingga penilaian terhadap belanja kontraktual ini menjadi pertimbangan dalam indikator penilaian kualitas penyerapan anggaran. Penelitian (Rahmawati & Ishak, 2020) juga membuktikan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa meliputi perencanaan pengadaan yang dilakukan badan pengadaan harus menetapkan pengaturan pengadaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program atau proyek yang ditetapkan. Khan (2018).

Kualitas Pengadaan Barang Jasa yang baik merupakan kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi kebutuhan dan keinginan pengguna. Yamit (2010) sehingga pengadaan barang atau jasa tersebut sesuai pesanan, sesuai kebutuhan dan diperoleh dengan harga yang sesuai (efisien).

Partisipasi Anggaran

Partisipasi sebagai suatu proses dalam pembuatan keputusan bersama yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota organisasi dimana keputusan tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap mereka yang menghasilkan keputusan tersebut. Mulyadi (2001).

Partisipasi anggaran merupakan kesempatan seorang bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran pada suatu organisasi. Sedangkan menurut Nurrasyid (2015:20), partisipasi anggaran merupakan seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penyusunan anggaran. Namun, dalam kondisi yang paling ideal sekalipun partisipasi anggaran akan memberikan kekuasaan kepada seorang bawahan untuk dapat menciptakan slack. Peningkatan slack tergantung sejauh mana individu lebih mementingkan diri sendiri atau demi kepentingan organisasi.

Partisipasi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara para karyawan dengan atasannya, dan karyawan melakukan aktivitas yang diperlukan dari awal penyusunan anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir dan revisi anggaran yang diperlukan. Arifin (2012) mengemukakan bahwa terdapat 2 dimensi penganggaran partisipatif, yaitu penentuan besarnya anggaran dan penetapan sasaran anggaran.

partisipasi anggaran adalah suatu proses dimana individu – individu terlibat di dalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi dan perlunya penghargaan atas pencapaian target mereka. Anggaran partisipatif mengacu pada pada tingkat dimana manajer berpartisipasi dalam mempersiapkan anggaran dan mempengaruhi sasaran anggaran pada masing – masing pusat pertanggungjawaban (Petrus, 2003).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Nur'Ain Amanda R. Diko (2023)	Penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Penyerapan Anggaran memberikan dampak untuk meningkatkan IKPA	Pelaksanaan anggaran dan SDM harus di optimalkan
2	Rahadi Nugroho (2017)	Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif	Meningkatkan penyerapan anggaran yang efektif	Pelatihan SDM dan koordinasi antar bagian terkait
3	Yaviza Nurmalasari Kaiya (2022)	Faktor Belanja Pemerintah	Faktor Menurunnya Penyerapan Anggaran	Perencanaan, dan Partisipasi Belanja Pegawai

		(Belanja Pegawai, Barang dan Modal)		
4	Cris Kuntadi (2023)	Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan anggaran	Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan anggaran	-
5	Muhammad Gustavo Puluala (2021)	Menguji pengaruh Perencanaan Anggaran, terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran	faktor awal yang penting dikarenakan perencanaan dijadikan sebagai pondasi dalam pelaksanaan anggaran	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia
6	Kuntadi, C., & Dian Rosdiana. (2022)	Variabel penyerapan anggaran mempengaruhi perencanaan anggaran APBN	Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggara	Pelaksanaan Anggarna terkait Efektivitas Penyerapan Anggaran
7	Mayu Sara Anggita S (2023)	variabel perencanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran	Memberikan pengaruh besar perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran	Sumber daya manusia lebih di tingkatkan dan diberikan pelatihan
8	Christian EM Pelealu (2023)	Teridentifikasinya permasalahan serapan anggaran	Memberikan fokus besar terhadap indentifikasi dari setiap permasalahan yang ada	Pelaksanaan anggaran yang lebih di fokuskan

Metode Penulisan

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, Ali & Limakrisna, (2013).

Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

1. Pengaruh Perencanaan anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Beberapa riset dengan perencanaan anggaran untuk menghasilkan hasil dengan konsekuensi penggunaan anggaran. Kesimpulan Ramadhani (2019) bahwa dukungan anggaran dipengaruhi oleh aturan, anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pembelian barang dan jasa dikuatkan oleh hasil penelitian ini. Penyerapan dana dapat secara positif dan nyata dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang cermat dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sebagaimana didukung oleh penelitian Rahmawati (2021) Muhamad Syahwildan, (2022).

Perencanaan anggaran yang akurat akan memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan mengalami hambatan, bahkan gagal dalam mencapai realisasi yang diharapkan. Berkaitan dengan instansi pembiayaan anggaran, perencanaan memiliki peran yang sangat penting, karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber dana. Proses perencanaan dalam rangka penyusunan program dan pengembangan dari kegiatan evaluasi kinerja. Proses perencanaan dan penganggarannya, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bottom up. Penetapan skala prioritas didasarkan atas analisis kebutuhan yang dianggap mendesak. Berdasarkan standar operasional prosedur perencanaan dan penganggaran penyusunan rencana pembiayaan Pendidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja.

Faktor perencanaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini variabel perencanaan menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan, dengan kata lain apabila permasalahan yang terjadi dalam perencanaan semakin tinggi atau perencanaan semakin buruk maka semakin rendah serapan anggaran di satuan kerja tersebut.

2. Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran. Herriyanto, (2012).

Kegagalan target penyerapan anggaran terkait pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh instansi akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya uang menganggur. Hal ini apabila berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) untuk fasilitas umum maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemberi amanah. Pada organisasi pemerintah, penyerapan anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kinerja.

Studi ini menemukan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berdampak signifikan terhadap penggunaan anggaran, yang dapat diartikan bahwa berpegang pada jadwal pengadaan secara langsung berkaitan dengan pemanfaatan anggaran yang lebih besar. Pengadaan barang dan jasa mungkin merupakan operasi yang memakan waktu, tetapi ini hanya karena banyaknya langkah teknis yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan

3. Pengaruh Pengadaan Jasa dan Barang terhadap penyerapan anggaran

Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kebijakan dalam partisipasi anggaran maka akan

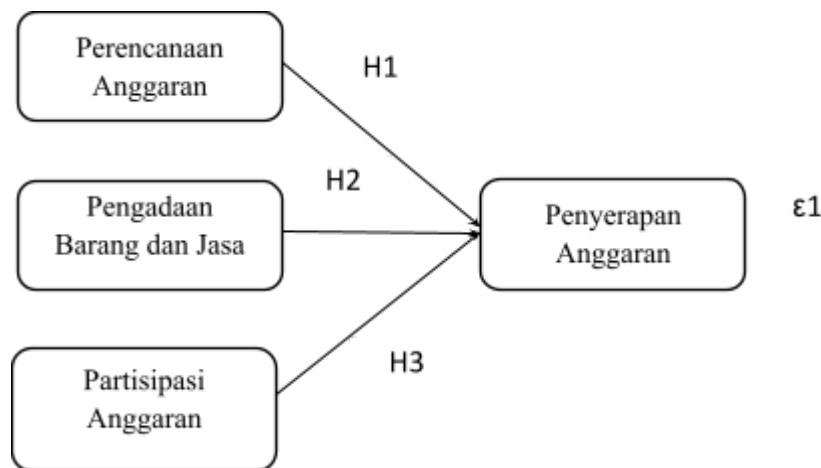
terjadi kenaikan penyerapan anggaran dan memberikan arti bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dan memberikan arti terjadi kenaikan Penyerapan anggaran.

Partisipasi anggaran sebagai suatu proses mengevaluasi setiap bidang organisasi dan menetapkan seberapa efektif atas dasar sasaran anggaran yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh di masing-masing kegiatan dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran lebih memungkinkan bagi para user ke masing-masing organisasi untuk melakukan negosiasi dgn atasan langsung mereka mengenai kemungkinan target anggaran yang dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.

Penganggaran partisipatif, sering dikenal sebagai penganggaran dari bawah ke atas, adalah metode untuk membuat rencana keuangan yang memasukkan masukan dari semua tingkat manajemen. Kemampuan untuk mengusulkan perubahan anggaran adalah contoh partisipasi, sedangkan kemampuan untuk menerima atau menolak anggaran yang diusulkan adalah contoh pengaruh

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi Penyerapan Anggaran, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- Kualitas Sumber Daya Manusia: Lelly Ani, JMV. Mulyadi, Dwi Pratowo (2020), Febrianti Puspita Sari, Jumadi Jumadi, Juhana Juhana (2022) dan Sasmita Atika Sari Harahap (2020).
- Koordinasi: Kuntadi, C, & Dian Rosdiana. (2022).
- Kejelasan Anggaran: Mari (2019),
- Administrasi: Sugeng Pristianto, Abu Bakar (2023), Hariz Muftie Hidayat, Ramdany Samukri (2022) dan Sasmita Atika Sari Harahap (2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.
2. Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.
3. Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

Saran

Dari hasil analisis secara khusus dapat diambil satu permasalahan yang mewakili dari obyek penelitian dalam faktor menurunnya Penyerapan Anggaran Belanja, sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir kesalahan dalam proses perencanaan anggaran yaitu kesalahan dalam penentuan akun, serta kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Satker harus mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Pejabat Inti Satker secara intensif, khususnya petugas yang menyusun dan membahas anggaran pada aplikasi RKA-KL, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi yang telah ada lebih diarahkan untuk materi penyusunan anggaran dengan mengundang narasumber yang kompeten dibidangnya.
2. Untuk memperlancar proses administrasi pengadaan barang/jasa Satker harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan bersertifikat bagi pejabat pengadaan dan pejabat penerima barang/jasa serta menyiapkan kaderisasi untuk tahun selanjutnya, sehingga para petugas/pejabat SDM yang dimiliki bisa menguasai dan kompeten dalam tugasnya, sehingga tata cara pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan petugas tidak akan merasa takut akan terlibat kasus KKN karena sudah dibekali dengan pengetahuan yang sesuai dengan tupoksinya dan proses pengadaan barang dan jasa lebih di sarankan untuk melakukan proses di awal tahun dan diharapkan selesai tahapan lelang di awal akan lebih efektif dan efisien waktu pelaksanaan.
3. Partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap unit-unit organisasi mulai level bawah sampai atas dalam menyampaikan target anggaran yang disusun dan membuat anggaran perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing orang sehingga tiap orang bisa saja memiliki anggaran yang berbeda dengan optimalisasi anggaran yang di rencanakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran, selain dari Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Partisipasi Anggaran pada semua satuan kerja Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arifin, S. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat
- Hapsari, Nanda. 2010. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi dan Locus of Control sebagai Variabel Moderating".
- Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja K/L di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
- Herriyanto. Hendris. 2012. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia
- Khan, N. (2018). Chapter 3 How It Is Done : Procurement Cycle And Procedures. In Public Procurement Fundamentals (pp. 29–61).
- Kuntadi, C., Retnoningsih, A. I., & Finlandia, D. A. (2022). Literature Review: Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 3 (4), 414-425.
- Kuntadi, Cris., Didiet Adi Nugroho. (2022). Literature Review : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. Dinasti Review : Jurnal Ilmu Manajemen Terapan.
- Mahsun, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Universitas Terbuka
- Mardiasmo, (2011), Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi Offset. Raharjo (2011). Pngelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.
- Mulyadi. (2001). Akuntansi Manajemen.
- Nurrasyid, Nazmudin M. 2015. Pengaruh Budgetary Participation, Information Asymmetry, Budget Emphasis, Job Relevant Information terhadap Budgetary Slack (Studi Empiris Pada Sekolah Menengah Atas di Tangerang). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 1(2), 081–090

- Rahajeng, A. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Rahmawati, R., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1).
- Roreng, Petrus Peleng. 2003. “Pengaruh Perceived Task Uncertainty terhadap hubungan Antara Karakteristik Sasaran Penganggaran dan Kinerja Manajerial”. Tesis Program Pasca Sarjana Studi Akuntansi Undip.
- Sodikin, S. S. (2015). *Akuntansi Pengantar 1*. UPP STIM YKPN.
- Sulaeman, Agus Sunarya; Andy Prasetiawan Hamzah dan Rame Priyanto. 2012. Penyerapan Anggaran Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Faktorfaktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal BPPK Vol.4 tahun 2012 hal 18-37*
- Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Yamit, Z. (2010). *Manajemen Kualitas Produk & Jasa (Pertama)*. Yogyakarta: Ekonisia.